

Analisis Determinasi Belanja Daerah (Studi Kasus Kota/Kabupaten Jawa Tengah Periode 2018 -2019)

Riski Wahyuningsih^{1*}, Dinar Melani Hutajulu²

¹²Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

Abstrak

Alasan penyelidikan adalah untuk membedah dampak pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja daerah terhadap penggunaan provinsi di perkotaan/daerah di Jawa Tengah. Memanfaatkan informasi opsional yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dan tulisan dinas terkait. Teknik mendalam untuk pemeriksaan ini adalah model eksperimen kekambuhan yang berbeda dan pengujian anggapan gaya lama melalui program EvIEWS 10. Konsekuensi dari uji teori yang diajukan, dua faktor bebas berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dan satu variabel otonom tidak berpengaruh kritis terhadap belanja provinsi. Gaji unik lokal dan cadangan devisa tidak biasa memiliki dampak positif dan besar pada pengeluaran lokal, sementara cadangan devisa umum memiliki dampak negatif dan tidak penting pada pengeluaran provinsi. Sangat terlihat bahwa pada saat yang sama ketiga faktor bebas yang digunakan mempengaruhi belanja provinsi di kota/kabupaten wilayah Jawa Tengah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Belanja Daerah.

Abstract

The reason for the investigation was to dissect the impact of regional original revenue, general allocation fund, special allocation fund, regional expenditure on provincial uses in urban areas/locale in Central Java. Utilizing optional information acquired from the Central Java Statistics Agency and related office writing. The insightful technique for this examination is the different relapse experimental model and old style supposition testing through the EvIEWS 10 program. The consequences of the proposed theory test, two free factors significantly affect territorial spending, and one autonomous variable has no critical impact on provincial spending. Local unique pay and uncommon exchange reserves have a positive and huge impact on local spending, while general exchange reserves have a negative and inconsequential impact on provincial spending. It very well may be seen that at the same time the three free factors utilized affect provincial spending in the city/regency of the region of Central Java.

Keywords: Regional Original Revenue, DAU, DAK, Regional Expenditure.

Pendahuluan

Pembangunan daerah dikatakan sebagai aspek penting bagi kemajuan daerah, hal ini dikarenakan pembangunan daerah merupakan indikator demi terwujudnya suatu pembangunan yang inklusif. Pembangunan daerah merupakan cara masyarakat dan pemerintah daerah dalam memangku sumberdaya serta membangkitkan pertumbuhan dari aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah ialah lembaga yang menyelenggarakan urusan admintrasi daerah dan dibantu oleh DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu berdasarkan hakikat otonomi di sistem NKRI selaras dengan UUD Tahun 1945.

ECONOMIE

Wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom guna menjalankan sendiri kegiatan administrasi daerah serta kebutuhan rakyat sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan disebut sebagai Otonomi daerah.

Melalui lembaga tersebut harapannya daerah mampu menciptakan kemandirian wilayah dengan cara memangku keunggulan sumber daya yang ada dengan mangkus dan sangkil. Sebab itu, masing-masing daerah wajib memperhitungkan besarnya dana yang dibutuhkan guna melaksanakan belanja daerah demi tercapainya pembangunan yang inklusif. Pendapatan dari masing-masing daerah menjadi salah satu ciri yang dapat menetapkan seberapa besar belanja daerah (Masayu & Catur, 2017). Cepat atau lambat suatu pembangunan daerah ditinjau dari penerimaan dana yang didapat pemerintah, apabila dana yang didapatkan besar maka belanja pemerintah daerah juga meningkat.

Dari grafik 1 terlihat bahwa belanja daerah di provinsi jawa tengah menempati urutan ketiga dengan nilai pengeluaran pemerintah yang rendah. Ini disebabkan oleh dana yang dimiliki pemda tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan daerah, sehingga menyebabkan pengeluaran belanja daerah kurang optimal. Pembangunan daerah yang dilaksanakan digantungkan pada anggaran dari pusat, yang berdampak pada peningkatan ekonomi daerah tidak mampu berkembang. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan pembangunan daerah melalui APBD agar realisasi belanja daerah mampu berjalan dengan semestinya.

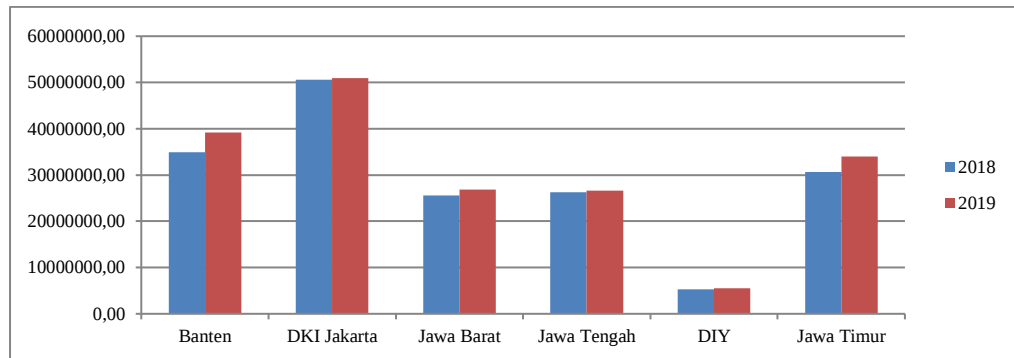
Sedangkan menurut kota/kabupaten di Jawa Tengah, pembiayaan belanja daerah hanya didominasi oleh Kota Semarang. Tahun 2018 belanja daerah tertinggi di kota semarang yaitu mencapai 4687029,03 juta rupiah, di tahun selanjutnya menaik sehingga menjadi 514842,77 juta rupiah. Sedangkan kota pekalongan memiliki belanja daerah yang rendah yaitu sebesar 983838,18 juta tahun 2018 dan 1035456,23 tahun 2019. 5 Kabupaten di provinsi jawa tengah juga memiliki pembiayaan daerah yang rendah, antara lain Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kudus, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Batang dan Kabupaten Rembang (Statistik Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah).

Masing-masing kabupaten tersebut hanya memiliki proporsi belanja daerah sekitar 1923910,90 juta. Hal ini mengindikasikan peran dari pemerintah daerah kurang begitu optimal dan dengan melihat hal tersebut pemerintah juga perlu mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi daerah sehingga belanja daerah mampu terealisasi.

Pemerintah provinsi juga berharap jika realisasi belanja daerah tidak hanya didominasi oleh kota semarang saja, melainkan seluruh kota/kabupaten harus mampu memiliki pengeluaran pemerintah yang bermanfaat agar mampu mengarahkan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Belanja daerah harus digunakan untuk urusan

ECONOMIE

yang komersial, misalnya sebagai pelaksanaan kegiatan perencanaan daerah. Kemampuan mengurus keuangan oleh pemerintah daerah termaktub dalam APBD misalnya kemampuan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dan memiliki potensi untuk mendanai pembangunan daerah serta pelayanan sosial kepada masyarakat (Ritno et al., 2015).



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Grafik 1. Pendapatan Pemerintah Menurut Provinsi di Pulau Jawa tahun 2018 – 2019

Makin meningkat penerimaan yang didapat oleh pemda, maka pengeluaran daerah guna pembangunan ekonomi pun semakin tercapai. Penerimaan asli daerah, dana perimbangan (DBH, DAU, DAK) serta lain-lain perolehan yang sah menjadi komponen penting dalam penerimaan daerah. PAD menjadi bagian dari komponen penerimaan daerah dapat didefinisikan sebagai perolehan daerah yang berasal dari komponen pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah, hak pengendalian finansial daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002). Tercatat dalam RAPBD (2019), pada secara keseluruhan mencapai 13,973 triliun. Namun, BPS mencatat bahwa perkembangan dari pad dilihat dari kota dan kabupaten cenderung berfluktuasi. Artinya memperlihatkan bahwa perolehan pajak dan retribusi daerah antar wilayah di Jawa Tengah kurang merata.

Tambunan (2006) berpendapat bahwa jikalau PAD bisa naik berarti keuangan yang dipunyai oleh pemerintah wilayah akan besar yang berdampak pada independensi daerah juga ikut menaik, akibatnya Pemerintah Daerah bakal memiliki gagasan akan lebih memompa keunggulan daerah serta memacu peningkatan ekonomi. Sehingga diharapkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dimanfaatkan guna meringankan kebutuhan belanja daerah juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan dalam pendanaan pengeluaran pemerintah tidak hanya berpedoman pada penerimaan daerah, pendapatan asli daerah tersebut belum tentu cukup. Upaya guna menyongsong pembangunan ekonomi daerah dibutuhkan anggaran relatif besar karena proporsi dari pendapatan asli daerah hanya bisa mendanai pengeluaran daerah sejumlah 20%. Dengan demikian, pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan otonomi daerah harus

ECONOMIE

melakukan kegiatan transfer (keuangan) guna mencukupi kebutuhan daerah. Kegiatan transfer antar pemerintah merupakan suatu kejadian yang sudah banyak ditemukan di berbagai wilayah atau terlepas dari sistem pemerintahannya.

Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menyebutkan guna melaksanakan suatu kewenangan di pemerintahan daerah, maka pemerintah pusat harus mengalokasikan dana perimbangan untuk daerah. Alokasi dana tersebut dapat berupa dana transfer umum dan khusus. Dana alokasi umum yaitu anggaran keuangan didapat melalui APBN lalu ditransferkan oleh pemerintah sentra untuk pemerintah wilayah guna mengurangi ketimpangan atau pemerataan keuangan antar daerah dan digunakan dalam membiayai kepentingan belanja (Sri & Yusriadi, 2017).

Sedangkan dana alokasi khusus ialah anggaran keuangan berdasar dari penerimaan APBN lalu ditransferkan ke setiap wilayah yang bertujuan guna membantu mendanai keperluan khusus. Berdasarkan data BPKAD, secara keseluruhan pemerintah melakukan transfer dana ke daerah kota/kabupaten provinsi jawa tengah yaitu sebesar 58,12 triliun yang mencakup DAU sebesar 35,53 triliun dan DAK sebesar 11,49 triliun. Diharapkan bahwa dana transfer tersebut dapat terealisasi guna memenuhi kebutuhan belanja daerah. Tujuan diadakannya transfer ini ialah guna meminimalkan ketimpangan pendapatan antar aparatur daerah dan mendukung terlaksananya layanan publik di semua daerah (Maemunah, 2006). Alokasi dana ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Pemerintah Daerah agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya.

Masalah ini pernah diteliti oleh (Sri & Yusriadi, 2017), hasilnya menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh simultan terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Selanjutnya penelitian dari (Rihfenti, 2017), hasil penelitian tersebut ialah bahwa komponen penerimaan daerah (PAD, DAU, DBH) berpengaruh pada belanja daerah provinsi kalimantan timur, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh pada belanja daerah provinsi kalimantan timur.

Penelitian dari (Claudia, 2016) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum ada pengaruh signifikan bagi belanja daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak ada pengaruh yang signifikan bagi belanja daerah. Dengan melihat adanya celah dari penelitian terdahulu, oleh karena itu, peneliti mempunyai tujuan menganalisis dari sisi penerimaan daerah bagi belanja daerah studi kasus kota dan kabupaten provinsi jawa tengah periode 2018-2019. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari kajian ini antara lain bagi pemerintah daerah diharapkan analisis ini bisa memberikan informasi untuk pemda dalam upaya meningkatkan peluang daerah yang dipunyai guna kemajuan daerah bersangkutan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa dipakai

untuk sumber referensi jika melakukan kajian dengan topik yang sama.

Tinjauan Pustaka

Belanja Daerah (BD)

Belanja daerah dikatakan sebagai pembiayaan oleh pemerintah daerah selama periode anggaran (Halim, 2002). Diatur Undang-Undang Nomor 58/2005 dijabarkan belanja daerah yakni keharusan pemerintah daerah dalam pembiayaan wilayah yang dilegalkan sebagai pengurang aset bersih. Dengan demikian disimpulkan, belanja daerah merupakan total kewajiban dan pembiayaan dari pemerintah daerah selama periode anggaran guna menciptakan pembangunan daerah yang inklusif. Belanja daerah terbagi menjadi 2 (dua) jenis antara lain Belanja Tak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung.

Pengeluaran tak langsung yaitu pengeluaran yang tidak ada hubungan langsung dengan perwujudan kegiatan program pemerintah. Komponen pengeluaran tidak langsung antara lain : a) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dimana belanja ini diperuntukkan kepada pegawai negeri sipil dalam bentuk gaji dan tunjangan dimana kompensasi tersebut diberikan sesuai perundangan yang sudah ditetapkan, b) Belanja bunga merupakan biaya yang dipakai guna membayar pengeluaran beban hutang dihitung menurut kewajiban pokok utang sesuai jangka waktu yang sudah disepakati, c) Belanja subsidi adalah belanja ini digunakan untuk membantu badan usaha dalam kaitannya untuk menunjang tarif produksi dalam badan usaha tersebut supaya konsumen mampu membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, d) Belanja hibah adalah biaya yang dipakai guna memberikan sumbangan yang berwujud barang/jasa, uang yang ditujukan kepada pemerintah maupun kelompok masyarakat dan secara umum mempunyai tujuan yang transparan, e) Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran yang ditransferkan guna memberikan uluran tangan kepada masyarakat yang berwujud barang dan uang, serta memiliki tujuan agar masyarakat hidup sejahtera, f) Belanja bagi hasil merupakan biaya yang dipakai guna memperhitungkan dana bagi hasil yang berasal dari penerimaan provinsi lalu disalurkan ke kabupaten/kota atau kabupaten/kota disalurkan ke pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, g) Belanja bantuan keuangan yaitu pengeluaran yang dianggarkan guna menghitung rata-rata bantuan keuangan dengan bersifat khusus ataupun umum dalam rangka meningkatkan kekuatan dari keuangan daerah, h) Belanja tidak terduga ialah pengeluaran dari urusan tidak terduga, contohnya pengeluaran dana ketika terjadi bencana alam dan sosial.

Belanja Langsung (BL) ialah pengeluaran yang memiliki hubungan langsung dengan perwujudan dari kegiatan program pemerintah. Komponen dari biaya langsung antara lain: a) Belanja pegawai ialah belanja yang dipakai guna membiayai setiap pengeluaran yang dilakukan pada saat mewujudkan rencana pemerintah, b) Belanja barang/ jasa dipakai guna membiayai setiap

ECONOMIE

pengeluaran yang berupa pembelian barang yang memiliki taksir utilitas < 12 bulan, c) Belanja modal ialah belanja yang dipakai guna membiayai pengeluaran yang berupa pengadaan/pembelian sarana dan prasarana pembangunan yang memiliki taksir utilitas > 12 bulan.

Penggunaan dana belanja daerah oleh pemerintah daerah harus efektif juga efisien. Oleh karena itu, agar mampu menaikkan tingkat ke-efektifan dan efisiensinya dari dana tersebut maka harus memperhatikan : a) Arah, hasil dan faedah, serta indikator yang hendak ditargetkan harus ditetapkan secara matang, b) Adanya penetapan kegiatan yang menjadi prioritas, beban kerja yang telah dihitung, serta harga upah yang akan didapatkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan didapatkan dari wilayah yang bersangkutan dan diambil menggunakan perundang-undangan yang berlaku (Halim & Jamal, 2006). Undang-undang Nomor 33/2004 yang mengatur mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah menjelaskan pendapatan asli wilayah merupakan penerimaan yg diperoleh wilayah diambil berdasarkan peraturan wilayah & anggaran perundang-undangan. Baldrick (2017) menyebutkan bahwa pendapatan memegang peranan penting, dikarenakan dari sisi penerimaan daerah bisa ditinjau sampai titik mana daerah mampu mendanai program pembangunan daerah yang digencarkan oleh pemerintah.

Menurut pendapat dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa PAD yaitu penghasilan yang diterima dari daerahnya sendiri, diambil menurut peraturan daerah yang telah disepakati dan dipakai guna memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan yaitu memberi izin pemerintah daerah guna membiayai kegiatan otonomi berdasarkan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi.

Komponen dari PAD antara lain : a) pajak daerah ialah peran serta badan usaha maupun perseorangan yang ditujukan untuk daerah tanpa adanya imbalan langsung yang digunakan untuk pembangunan daerah, dimana peran serta dari badan usaha maupun perseorangan memiliki sifat yang wajib, b) retribusi daerah ialah pendapatan dari dana yang menjadi pembayaran jasa atau ijin eksklusif yang diberikan pemerintah daerah, c) output pengelolaan kekayaan yg dipisahkan adalah komponen aset wilayah dimana BUMD yang ditugaskan untuk mengelola kekayaan tersebut, d) lain-lain PAD yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

(Bratakusumah & Solihin, 2002) Dana Alokasi Umum (DAU) ialah suatu dana yang mempunyai tujuan untuk pemerataan keuangan daerah diantaranya jaminan tersedianya layanan dasar untuk masyarakat, dan satu kesatuan dengan penerimaan generik dalam pendapatan &

ECONOMIE

belanja daerah. Bastian (2003) Dana Alokasi Umum yaitu salah satu bagian di dalam dana perimbangan yang ditransferkan guna perataan kemampuan keuangan antar wilayah.

Sedangkan Halim (2002) beragumen jika Dana Alokasi Umum ialah dana yang didapat berdasarkan APBN lalu didistribusikan guna perataan kemampuan keuangan wilayah serta mendanai keperluan pengeluaran wilayah sebagai bentuk dari pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum yaitu sejumlah uang yang ditransferkan pemerintah sentra ke pemerintah daerah setiap periode waktu, dana tersebut dipakai untuk mendukung proses pembangunan di masing-masing daerah sesuai dengan keperluan daerahnya. Dana Alokasi Umum (DAU) memegang penting dalam proses pembangunan. Penentuan angka alokasi anggaran yang ditentukan oleh pemerintah pusat sangat penting bagi pemerintah karena akan berdampak pada pembangunan ekonomi di daerah.

Dana ALokasi Khusus (DAK)

Halim (2002) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu sejumlah dana uang dari APBN kemudian didistribusikan ke wilayah dan memiliki tujuan yaitu membantu daerah guna mendanai kebutuhan khusus sesuai dengan prioritas nasional. Diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 23 yang menguraikan bahwa Dana Alokasi Khusus ialah anggaran yang berasal dari penerimaan APBN ditransferkan untuk daerah dan mempunyai tujuan yaitu membantu membiayai urusan khusus daerah selaras dengan prioritas nasional, transfer ini dapat dimanfaatkan untuk menaungi ketimpangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas daerah yang meliputi kegiatan di bidang pengetahuan, kesehatan, sarana prasarana, serta kondisi lingkungan disekitar masyarakat. Dana Alokasi Khusus memegang peran penting dalam pembangunan prasarana & sarana layanan dasar masyarakat yang selaras dengan aspek desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Rihfenti (2017), dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, dan dana bagi hasil mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah, sementara itu dana alokasi khusus tidak mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah. Secara simultan keempat variabel yang dipakai dalam kajian memiliki pengaruh pada belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dari nilai R-square sebesar 89,2% dipengaruhi oleh variabel bebas yang dipakai, sedangkan 10,8% dipengaruhi variabel lain diluar model.

ECONOMIE

Penelitian Masayu Rahma & Catur (2017), dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Kesimpulan dari analisis yakni pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sangat erat kaitannya dengan belanja daerah. Dari hasil uji hipotesis kedua variabel yang dipakai menghasilkan dampak signifikan bagi belanja daerah Kota Bandung.

Penelitian Sri & Yusriadi (2017) dengan judul penelitian Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Aceh. Kesimpulan dari riset membuktikan jika kedua variabel yang dipakai berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah provinsi aceh.

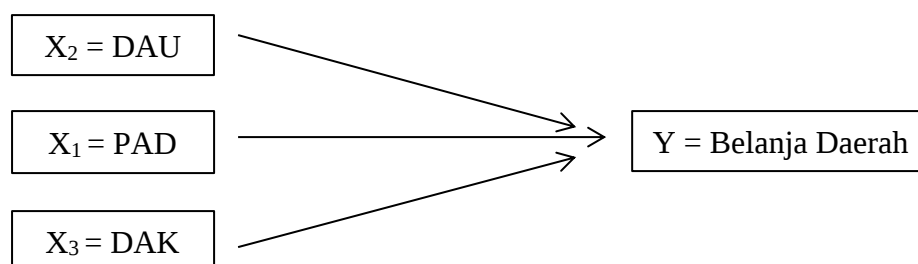
Penelitian Rifki (2015) dengan judul penelitian Flypaper Effect dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Barat. Kesimpulan dari kajian yang dilakukan menunjukkan apabila dilihat dari nilai probabilitasnya $> 0,05$ dapat dikatakan bahwa variabel yang dipakai secara bersamaan mempengaruhi belanja daerah secara signifikan.

Penelitian Sherlinda et al. (2019), dengan judul Fenomena Flypaper Effect Pada PAD, DAU, dan DBH Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah di Pulau Jawa Tahun 2013-2017. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAU dan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Pulau Jawa.

Penelitian Andri et al. (2014), dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Kesimpulan dari kajian yang dilakukan yaitu ada pengaruh signifikan antara PAD & DAU, sedangkan ada hubungan negatif untuk variabel jumlah penduduk bagi belanja langsung di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir penelitian merupakan pedoman dalam tahap pendekatan di penelitian yang memiliki tujuan untuk mempermudah dalam mengkaji dan menganalisis suatu penelitian. Adapun kerangka berpikir penelitian ialah:



Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian

Hipotesis Penelitian

1. H1 (Hipotesis X_1)

ECONOMIE

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah bagi Belanja Daerah.

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah bagi Belanja Daerah

2. H2 (Hipotesis X_2)

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum bagi Belanja Daerah

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum bagi Belanja Daerah

3. H3 (Hipotesis X_3)

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus bagi Belanja Daerah

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus bagi Belanja Daerah

Metode Penelitian

Analisis yang dilaksanakan memakai data sekunder yang didapatkan dari BPS Jawa Tengah & instansi terkait. Bahan dari penelitian yang dilakukan mempunyai kurun waktu 2 tahun yaitu diambil dari tahun 2018 – 2019. Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) disebut sebagai variabel independen. Sedangkan Belanja Daerah (Y) merupakan variabel dependen. Total jumlah observasi dari penelitian adalah 70 data yang diambil dari 35 kota & kabupaten Jawa Tengah dalam waktu 2 tahun. Variabel yang jadi obyek analisis didefinisikan sebagai berikut.

1. Belanja Daerah ialah pengeluaran dari rekening kas daerah dan menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagai penyusutan dari aset bersih pada periode anggaran.
2. Pendapatan Asli Daerah ialah suatu pendapatan dari daerah itu sendiri, dan diambil sesuai aturan undang-undang yang berlaku.
3. Dana Alokasi Umum ialah sejumlah uang yang ditransferkan pemerintah sentra ke pemerintah wilayah bertujuan sebagai pemerataan finansial dalam membantu membiayai keperluan belanja daerah guna mencapai pembangunan ekonomi suatu daerah.
4. Dana Alokasi Khusus ialah sejumlah uang yang ditransferkan pemerintah sentra ke pemerintah wilayah guna memenuhi keperluan khusus demi tercapainya pembangunan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan memakai regresi data panel dan pendekatan yang terpilih ialah model fixed effect. Data panel ialah perpaduan antara data runtut waktu dan cross section, model fixed effect dipilih karena peneliti memiliki asumsi terdapat perbedaan antara kota/kabupaten dalam mengatur keuangannya tanpa melihat periode waktu anggaran. Model persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = f(x_1, x_2, x_3)$$

ECONOMIE

$BD = f(\text{Pendapatan Asli Daerah}, \text{Dana Alokasi Umum}, \text{Dana Alokasi Khusus})$

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \epsilon$$

Keterangan =

Y : Belanja Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

β_0 : Konstanta

i : Kota/Kabupaten di Jawa Tengah

t : Tahun

ϵ : Error Term

Untuk menguji hasil output, maka peneliti akan melakukan uji statistik koefisien determinasi (R^2), tujuannya guna melihat kemampuan variabel penjelas yang secara simultan mampu menjelaskan varians dalam variabel terikat. Kemudian dilakukan uji F, dilaksanakan guna mendapati pengaruh variabel penjelas yang digunakan di analisis terhadap variabel terikat, setelah itu melakukan uji hipotesis klasik.

Uji normalitas dengan tujuan guna mendapati apakah model regresi terjadi pelanggaran normalitas atau memiliki distribusi normal. Pengujian dapat dilihat dari J-Berra dan nilai signifikansi $> 0,05$ artinya model memiliki distribusi normal. Selanjutnya uji multikolinearitas, yang bertujuan guna mendapati apakah ada korelasi tinggi antar variabel X. Dikatakan tidak terjadi pelanggaran multikolinearitas jika antar variabel X nilainya tidak $> 0,90$ (Ghozali, 2013:68).

Selanjutnya uji heteroskedastisitas, memiliki tujuan guna mendapati apakah ada tidaknya varians yang tidak sama antara residual satu pengamatan dengan residual pengamatan lainnya. Disimpulkan tidak terdapat pelanggaran heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya $> 0,05$. Kemudian uji autokorelasi, mempunyai tujuan guna mendapati apakah ada korelasi error antara residual dalam model regresi. Untuk mengetahui apakah terdapat autokorelasi atau tidak menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM Test), tidak terjadi masalah autokorelasi apabila lebih dari taraf signifikansi > 0.05 .

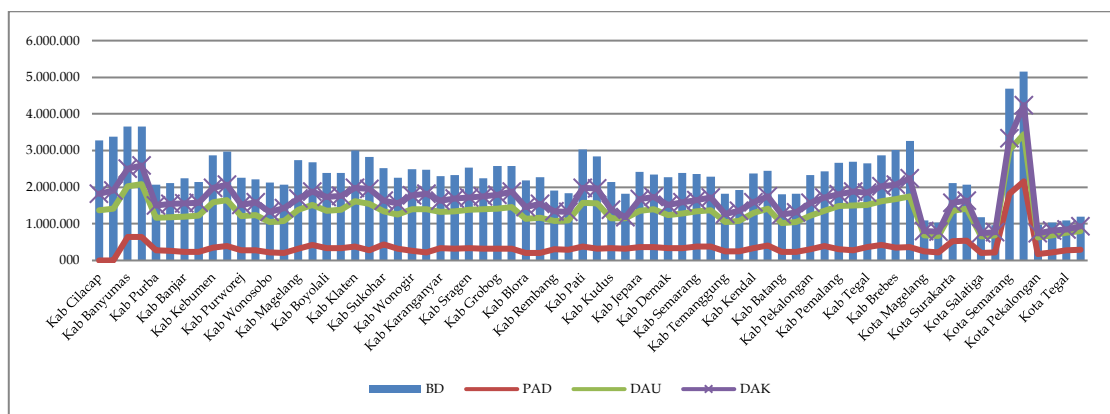
Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Perkembangan belanja daerah selama periode penelitian cenderung fluktuatif di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. Tabel 1 terlihat jika Pengeluaran Pemerintah atau Belanja Daerah yang paling rendah ialah Kota Pekalongan dengan jumlah 983838,18 juta atau setara dengan 983,84 miliar. Belanja daerah di Kota Pekalongan menurun disebabkan oleh adanya

ECONOMIE

bencana banjir pada tahun tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan bahwa pemerintah daerah bisa menggunakan anggaran belanja tak terduga untuk penanganan bencana. Oleh karena itu, pemerintah pekalongan menggunakan belanja tak terduga yang termasuk ke dalam komponen di belanja tidak langsung sebagai sumber pendanaan bagi penaganan bencana alam. Menurut Bupati Kota Pekalongan (Kh. Asip Kholbihi) dana belanja tak terduga yang dikerahkan lebih dari 100 miliar digunakan untuk pembangunan tanggul, yang diharapkan dengan berdirinya tanggul tersebut dapat menahan bencana banjir. Hal inilah yang menyebabkan belanja daerah di tahun anggaran tersebut menurun. Kemudian, belanja daerah tertinggi di Kota Semarang yaitu sebesar 5148427,77 juta atau setara dengan 5148,43 miliar. Akan tetapi, peningkatan belanja daerah tersebut tidak signifikan. Hal ini dikarenakan adanya defisit dari APBD sebesar 375 miliar yang menjadi beban anggaran di tahun 2019.



Sumber. Statistik Keuangan Daerah, data diolah

Grafik 3. Pengeluaran & Penerimaan menurut Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2019

Perkembangan pendapatan asli daerah selama periode penelitian cenderung fluktuatif di kota dan kabupaten provinsi Jawa Tengah. Dari tabel terlihat jika pendapatan asli terendah di kota Pekalongan sebesar 179224,41 juta atau setara dengan 179,22 miliar. Penyebab rendahnya pendapatan asli daerah di Pekalongan rendah karena komponen pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor perpajakan cenderung rendah, khususnya di sektor pajak restoran. Menurut Badan Keuangan Daerah, penurunan ini disebabkan oleh ketidaktaatan pemilik restoran yang membayar pajak terhitung dari 153 restoran di Pekalongan hanya 10 persen yang taat membayar pajak. Sedangkan Kota Semarang memiliki penerimaan daerah tertinggi di provinsi Jawa Tengah yakni sebanyak 2159409,77 juta atau setara dengan 2159,41 miliar. Menurut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pendapatan tinggi didukung oleh pajak bumi bangunan. Walaupun penerimaan asli daerah yang diterima masing-masing kota & kabupaten di Jawa Tengah tahun 2018 – 2019 berfluktuasi, tetapi memiliki tingkat fluktuasi yang meningkat. Komponen dari pendapatan asli

ECONOMIE

daerah yang paling penting ialah pajak, oleh karena itu perhatian dan kesadaran dari wajib pajak perlu ditingkatkan agar mampu mendorong penerimaan daerah.

Secara keseluruhan pendistribusian dana alokasi umum pada tahun 2018 – 2019 cenderung meningkat menurut kota/kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Dengan tingginya dana alokasi yang dialirkan, maka diharapkan kegiatan pembiayaan daerah mampu berjalan lancar karena belanja daerah di provinsi Jawa Tengah cenderung fluktuatif juga diharapkan terjadi pemerataan pembangunan setiap wilayah di kota/kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Pengalokasian dana alokasi umum juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang dapat menyebabkan kegiatan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah tidak terhambat. Pengalokasian dana alokasi khusus cenderung fluktuatif menurut kota/kabupaten di provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2019. Jika APBN tersedia cukup banyak maka pemerintah pusat mampu mengalokasikan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus (Nujma, 2019).

Pengalokasian dana alokasi khusus provinsi Jawa Tengah tergolong berhasil. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 – 2019 dana tersebut mampu membantu membiayai belanja daerah. Pada tahun 2018 dana alokasi khusus terendah yaitu Kota Pekalongan, hal ini dikarenakan terdapat dugaan penyimpangan pelaksanaan dana alokasi khusus di bidang pendidikan. Penyimpangan tersebut antara lain pengerjaan perbaikan ruang diserahkan secara keseluruhan kepada pihak tertentu, terjadi kesalahan dalam perencanaan pembangunan, pembelian sarana dan prasarana sekolah dengan bahan baku berkualitas rendah. Maka dari itu pihak pemerintah harus mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam mengelola dana alokasi khusus agar tidak menimbulkan penyimpangan lagi.

Hasil Pengujian

Tabel 1 Hasil Estimasi dengan FEM

Variabel Independen	Coef	Prob	Ket
PAD	0.895142	0.0217	Sig
DAU	- 0.143061	0.2461	Tidak Sig
DAK	0.626033	0.0360	Sig
C	1973164.	0.0000	Sig

R-squared 0.995010

F-stat 172.4461

Prob(F-stat) 0.000000

Sumber: Data diolah eviews 2010, 2021

Dari tabel diatas maka bentuk persamaan regresi data panel yang diperoleh sebagai berikut:

$$Y_{it} = 1973164 + 0.895142PAD_{it} - 0.143061DAU_{it} + 0.626033DAK_{it} + \epsilon$$

ECONOMIE

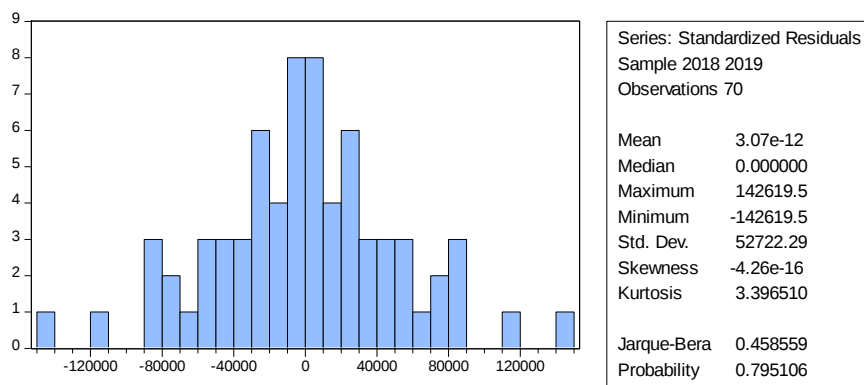
Berdasarkan hasil estimasi diperoleh hasil sebesar 0,995010 yang berarti bahwa belanja daerah sebesar 99,50 % di Jawa Tengah secara simultan dapat dijabarkan oleh tiga variabel bebas yaitu: pendapatan asli daerah, dana distribusi umum dan distribusi khusus. Sisanya 0,50% dijabarkan oleh variabel lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Menurut hasil estimasi, Uji-F yakni 172.4461, dan nilai probabilitasnya adalah $0,000000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah (X1), dana distribusi umum (X2) dan dana distribusi khusus (X3) semuanya mempengaruhi belanja daerah Jawa Tengah secara bersamaan.

1) Uji Normalitas

Hipotesis yang dibangun dalam pengujian normalitas sebagai berikut:

Ho : Data berdistribusi normal $> \alpha 5 \%$

H1 : Data tidak berdistribusi normal $< \alpha 5 \%$



Sumber: Data diolah views 2010, 2021

Gambar 4. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan, data yang diteliti menghasilkan angka Jarque-Bera sebesar 0,458559 dan nilai probabilitasnya ialah 0,795106 yang berarti bahwa probabilitas dari Jarque-Bera sebesar $0,458559 > \alpha 5 \%$ artinya bahwa tidak terjadi pelanggaran normalitas, sehingga asumsi klasik di fixed effect model terpenuhi. Maka dengan demikian dapat menolak H1 dan menerima Ho.

2) Uji Multikolinearitas

Berdasarkan uji multikolinearitas yang dilakukan, informasi yang diteliti menghasilkan nilai korelasi antar variabel independen $< 0,9$. Dapat diambil simpulan tidak terjadi pelanggaran multikolinearitas. Maka dengan demikian dapat menolak H1 dan menerima Ho.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

	PAD	DAU	DAK
PAD	1.000000	0.322604	0.480093
DAU	0.322604	1.000000	0.802707
DAK	0.480093	0.802707	1.000000

Sumber: Data diolah views 2010, 2021

3) Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji heteroskedastisitas yang dilakukan, data yang diteliti menghasilkan hasil jika ketiga variabel yang dipakai dengan nilai probabilitas $> 0,05$ yaitu 0,1372; 0,8285; dan 0,3074 dapat diambil simpulan bahwa tidak terjadi pelanggaran heteroskedastisitas. Maka dengan demikian H_1 ditolak dan H_0 diterima.

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Prob.	Keterangan
PAD	0.1372	Tidak Terjadi Pelanggaran Heteroskedastisitas
DAU	0.8285	Tidak Terjadi Pelanggaran Heteroskedastisitas
DAK	0.3074	Tidak Terjadi Pelanggaran Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah eviews 2010, 2021

4) Uji Autokorelasi

Berdasarkan uji autokorelasi yang dilakukan, data yang diteliti menghasilkan nilai Obs*R-squared 2,616902 dan dengan nilai Prob. Chi-Square (2) ialah 0,2702. Dapat diambil simpulan bahwa tidak terjadi pelanggaran autokorelasi, sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima.

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.242758	Prob. F(2,64)	0.2955
Obs*R-squared	2.616902	Prob. Chi-Square(2)	0.2702

Sumber: Data diolah eviews 2010, 2021

Pembahasan

Pada pengujian data panel yang memakai metode kuadrat terkecil (*OLS*) didapat hasil estimasi seperti tabel 1. Berdasarkan data diatas probabilitas PAD yakni 0,0217 & nilai probabilitas dari dana alokasi khusus sebesar 0,0360 yang berarti terdapat pengaruh signifikan bagi belanja daerah karena nilai signifikansi kurang dari 5% sehingga menolak H_0 dan menerima H_a . Sedangkan dana alokasi umum dengan nilai probabilitas sebesar 0,2451 terdapat pengaruh tidak signifikan bagi belanja daerah karena nilai signifikansinya lebih dari 5% maka menerima H_0 dan menolak H_a . Dari variabel independen yang dipilih, ketiganya terdapat pengaruh bagi belanja daerah. Akan tetapi dari tiga variabel tersebut tidak semua data menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Pendapatan asli daerah ada pengaruh positif signifikan bagi belanja daerah, terlihat dari hasil regresi nilai koefisiennya yaitu 0,895142 yang membuktikan bahwa angka tersebut positif dan jika PAD naik 1% maka belanja pemerintah ikut naik sebesar 0,895142. Ini sejalan dengan penelitian (Rihfenti, 2017) yang hasilnya menunjukkan jika PAD punya pengaruh bagi belanja daerah.

ECONOMIE

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan yang didapat daerah kian menaik maka jumlah belanja pemerintah akan meningkat pula (Wildan, 2017). Dari hasil persamaan regresi, konstanta bernilai positif membuktikan bahwa belanja daerah dijadikan sebagai biaya tetap yang wajib dibayar oleh pemerintah di setiap waktunya melalui PAD guna mencapai pembangunan daerah. Diketahui pendapatan asli daerah di kota/kabupaten Jawa Tengah mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat, sumber utama dalam peningkatan penerimaan asli daerah ialah penerimaan pajak. Sebab itu, diperlukan kesadaran masyarakat guna membayar pajak sesuai dengan jangka waktu yang berlaku sehingga mampu meningkatkan penerimaan yang akan didapatkan oleh daerah dengan demikian pengeluaran daerah juga ikut naik.

Berdasarkan hasil analisis Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif tidak signifikan bagi belanja daerah, terlihat dari hasil regresi nilai koefisiennya yaitu $-0,143061$ menunjukkan angka negatif dan apabila dana transfer itu turun 1% menyebabkan belanja daerah ikut menurun sebesar $-0,143061$. Penelitian dari (Sherlinda et al., 2019) menunjukkan bahwa dana transfer atau dana alokasi umum yang dialokasikan jumlahnya kurang dari penerimaan asli daerah akan menyebabkan dana transfer tersebut tidak memberikan pengaruh yang krusial terhadap peningkatan belanja daerah. Sedangkan kajian ini angka penerimaan yang didapatkan di kota/kabupaten provinsi Jawa Tengah cenderung rendah dan alokasi dana umum cenderung tinggi sehingga berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu. Kajian ini selaras dengan kajian yang dilaksanakan (Gerungan et al., 2017) dimana tidak ada pengaruh signifikan antara dana alokasi umum bagi belanja daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah cenderung lebih memprioritaskan dana transfer umum digunakan sebagai biaya staf, barang dan jasa serta lainnya. Pernyataan tersebut didukung dengan data dari BPKAD bahwa transfer dana alokasi umum tahun 2019 dimana dana tersebut lebih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai. Bahwasannya selain untuk pelaksanaan desentralisasi, 25 % dari dana transfer umum juga harus dimanfaatkan sebagai pembangunan infrastruktur. Tercantum dalam UU No 33 th 2004 bahwa dana alokasi umum diberikan untuk pembangunan di masing-masing daerah, dan diharapkan alokasi dana tersebut mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah sehingga outputnya pembangunan di daerah dapat berkembang pesat. Dana alokasi umum tidak hanya dipakai guna belanja pegawai saja hal ini bisa menyebabkan peran dari dana alokasi umum kurang optimal untuk belanja daerah guna mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan daerah menjadi prioritas utama, hal ini dikarenakan dapat menjadi daya tarik bagi investor. Apabila pembangunan daerah baik maka investasi yang masuk ke daerah pun akan besar, yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas, Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif signifikan bagi belanja daerah, terlihat dari uji regresi jika nilai koefisien dari dana khusus yaitu

ECONOMIE

0,626033 menunjukkan angka positif dan jika dana khusus naik 1% maka pengeluaran daerah juga naik sebanyak 0,626033. Hasil didukung oleh penelitian Nugraheni (2011) bahwa variabel Dana Alokasi Khusus terdapat pengaruh positif signifikan bagi belanja daerah. Anggaran dana transfer yang diberikan oleh pemerintah sentra kepada wilayah dipakai guna mendukung kegiatan belanja daerah demi tercapainya pembangunan ekonomi. Dana ini dipergunakan untuk membantu daerah dalam membiayai kebutuhan khusus seperti biaya administrasi, biaya penelitian, biaya proyek seperti rehabilitasi gedung sekolah, akses kesehatan, dan lain-lain, sehingga dana alokasi khusus dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan belanja daerah. Dana Alokasi Khusus dipakai secara tepat guna akan mampu mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan publik dari pemerintah seperti menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dalam jangka panjang mampu memikat perhatian investor untuk menginvestasikan modal di wilayah yang akan dituju oleh para investor. Oleh karena itu, dapat dikatakan dana alokasi khusus lebih memprioritaskan kepada belanja langsung, dan tidak heran jika transfer tersebut berdampak signifikan bagi belanja daerah.

Kesimpulan**1) Kesimpulan**

Hasil analisis yang berjudul Analisis Penerimaan Daerah terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Kota dan Kabupaten Jawa Tengah periode 2018-2019) metode yang digunakan ialah analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terdapat pengaruh positif signifikan bagi belanja daerah. Sedangkan dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan bagi belanja daerah. Dapat dilihat dari adanya nilai koefisien determinasi (R^2), dimana nilai tersebut bisa menentukan proporsi variabel dependen dikarenakan nilai r -square sebesar 99,50 % dijelaskan oleh variabel yang dipakai, sedangkan 0,50 % dijabarkan variabel lain.

Dua variabel yang memiliki pengaruh signifikan dikarenakan komponen penerimaan pemerintah tersebut ditujukan untuk memenuhi keperluan belanja daerah demi memajukan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat. Sedangkan satu variabel mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah, dikarenakan pemanfaatan dana tersebut hanya dipakai guna mencukupi belanja dan tunjangan pegawai, dan menyebabkan peran dari dana alokasi umum menjadi kurang optimal.

2) Saran

Pendapatan asli daerah yang menjadi sumber utama dalam pendapatan daerah diharapkan selalu meningkat. Kebijakan dari pemerintah yang tidak simpang siur dalam mengelola potensi daerah serta kesadaran dari masyarakat yang menjadi wajib pajak agar taat dalam melunasi pajak

ECONOMIE

agar mampu menaikkan pendapatan asli daerah sehingga pemerintah mampu melaksanakan urusannya dalam membangun daerah.

Dana Alokasi Umum harus dimanfaatkan secara selektif agar pendistribusian dana alokasi umum tersebut dapat berperan secara optimal bagi belanja daerah. Pendistribusian dana alokasi khusus juga harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah, hal ini dikarenakan dana khusus tersebut digunakan untuk menunjang pembangunan prasarana dan sarana fisik kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Andri, D., Arman, D., & Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63–70. <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/JES/article/view/2255/pdf>
- Baldrick, S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). UPP.
- Bastian, I. (2003). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Pusat Pengembangan Akuntansi*. Universitas Gajah Mada.
- Bratakusumah, S. D., & Solihin, D. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Claudia, S. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. *E-Journal Universitas Sam Ratulangi*, 4(3), 705–716.
- Gerungan, H., Saerang, D. P., & Ilat, V. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *JURNAL Riset AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(1), 233–245. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15427>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Pertama). Salemba Empat.
- Listiorini, L. (2012). Fenomena Fly Paper Effect Pada Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan*, 4(2), 111–126.
- Maemunah, M. (2006). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

ECONOMIE

Simposium Nasional Akuntansi IX, 23–26.

Mardiasmo. (2002). *Perpajakan*. Andi.

Masayu, R. W., & Catur, M. F. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>

Nugraheni. (2011). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah. *Akmenika UPY Universitas Mercu Buana Yogyakarta.*, 8, 96–117.

Rifki, A. K. H. (2015). Flypaper Effect dan Belanja Daerah di Propinsi Jawa Barat. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 211–230. <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2306>

Rihfenti, E. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>

Ritno, R. H., Jantje, T. J., & Novi, B. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 23–32.

Sherlinda, A., Lorentino, T. L., & Rian, D. (2019). Fenomena Flypaper Effect pada PAD, DAU dan DBH Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah di Pulau Jawa Tahun 2013-2017. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1 (4), 479–494.

Sri, M., & Yusriadi. (2017). Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Aceh. 1(2), 211–220. <https://doi.org/10.22236/agregat>

Tambunan, T. (2006). *Iklim Investasi Di Indonesia: Masalah, Tantangan Dan Potensi*. Kadin-Indonesia - Jetro.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004

Wildan, D. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5(2), 153–156. <https://doi.org/10.25157/je.v5i2.963>